Abstrak

Indonesia adalah negara hukum, setiap warga negara bersamaan kedudukannya terhadap penegakan dan perlindungan hukum. Sehingga setiap aksi kejahatan dan pelanggaran hukum pelaku pasti akan mendapatkan konsekuensi hukum terhadap perbuatan yang meresahkan dan merugikan orang dan pihak lain, seperti pada aksi anarkhis yang dilakukan oleh para preman yang bernaung dalam suatu ormas tertentu yang melakukan tindak kekerasan dan ancaman serta melakukan pengerusakan terhadap fasilitas milik Negara, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan dalam masyarakat. Konsekuensi pada tindakan ini jelas dapat dijerat dengan pasal dan sanksi hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum terhadap tindakan anarkhis premanisme berkedok ormas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang terkait Keormasan itu sendiri.

Pada hasil penelitian yang dibahas dalam penelitian ini didapati bahwa pemerintah tidak boleh kalah pada aksi anarkhis yang ditimbulkan oleh preman berkedok ormas ini. Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperi Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim pemerintah melakukan langkah dan upaya konkrit membasmi aksi premanisme berkedok ormas yang meresahkan masyakarat ini. Terlebih disaat mereka melakukan ancaman dengan kekerasan, penganiayaan dan bahkan melakukan pengerusakan terhadap fasilitas negara, sebagaimana perilaku buruk ormas Keris Bali yang melakukan penyerangan ke Kantor Satpol PP di kota Denpasar Bali. Dimana mereka telah berproses secara hukum dan telah pula jatuhi hukuman penjara selama 5 tahun karena secara sah dan terbukti melakukan kesalahan pada perbuatannya.

Kata Kunci: Anarkhisme Preman berkedok ormas, pengerusakan fasilitas negara, dan aspek kriminologi.

Abstract

Indonesia is a state governed by the rule of law, in which every citizen holds equal standing before the law in terms of legal enforcement and protection. Therefore, every criminal act and violation of the law committed by individuals will inevitably result in legal consequences for actions that disturb and harm other people and parties. This includes anarchic acts carried out by thugs operating under the guise of certain mass organizations, who engage in violence, intimidation, and the destruction of state-owned facilities, thereby creating discomfort and unrest within society. Such actions can clearly be prosecuted under the applicable legal provisions and sanctions.

This study employs a normative juridical research method, aimed at conducting research based on library sources combined with statutory regulations related to law enforcement against anarchic acts of thuggery disguised as mass organizations, based on the Indonesian Criminal Code and laws governing mass organizations.

The findings of this study indicate that the government must not yield to the anarchic actions committed by thugs operating under the cover of mass organizations. In coordination with law enforcement agencies such as the Police, Prosecutors, and Judges, the government has undertaken concrete measures and efforts to eradicate acts of thuggery disguised as mass organizations that disturb public order. This is especially important when such groups engage in threats of violence, assault, and even the destruction of state facilities, as demonstrated by the actions of the Keris Bali organization, which attacked the Satpol PP Office in Denpasar, Bali. The perpetrators were legally prosecuted and sentenced to five years of imprisonment after being lawfully and convincingly proven guilty of their actions.

Keywords: anarchic thuggery disguised as mass organizations, destruction of state facilities, criminological aspects.